

PENGUATAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN ADMINISTRASI DPRD KABUPATEN BARRU MENUJU TATA KELOLA YANG AKUNTABEL

Strengthening Institutional Performance and Administrative Governance of the Barru Regency Regional House of Representatives (DPRD) Toward Accountable Governance.

Anisafitri¹, Hernianti Harun², Yana Ameliana

Email: anisaafitri2409@gmail.com¹, herniantiharunanty@gmail.com², yana.ameliana@gmail.com³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua

Jl. Jend. Ahmad Yani No. Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
91131

Abstrak

Artikel pengabdian ini mendokumentasikan kegiatan magang yang dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru guna mengamati aspek administrasi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Melalui kegiatan magang, peserta terlibat langsung dalam aktivitas administrasi, pelayanan kesekretariatan, serta pendampingan agenda-agenda persidangan sehingga dapat mengamati tata kelola administrasi, koordinasi antarunit, dan kinerja kelembagaan sebagai mitra pemerintah daerah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa administrasi DPRD telah mengikuti prosedur yang berlaku, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam sistem dokumentasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan kompetensi staf. Dari sisi kinerja, DPRD menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penyusunan regulasi dan partisipasinya dalam proses kebijakan daerah, sementara fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal, khususnya terkait tindak lanjut rekomendasi kepada pemerintah daerah. Selain itu, proses penganggaran masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan data teknis, dan partisipasi publik dalam kegiatan legislasi masih belum merata. Kegiatan ini memberikan rekomendasi penguatan administrasi dan kinerja kelembagaan melalui digitalisasi, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Administrasi Legislatif, Kinerja Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Fungsi Pengawasan, Kegiatan Magang

Abstract

This community service article documents the internship activities carried out at the Regional House of Representatives (DPRD) of Barru Regency to observe administrative practices and institutional performance in implementing legislative, oversight, and budgeting functions. Through the internship program, participants engaged directly in administrative activities, secretariat services, and support for legislative meetings, allowing observation of governance procedures, interunit coordination, and institutional performance as a partner to the local government. The results of the activities indicate that DPRD administration has followed applicable procedures, although improvements are still needed in documentation systems, information technology utilization, and staff competency development. In terms of performance, the DPRD shows notable progress in regulatory formulation and participation in regional policy processes, while the oversight function has not yet been fully optimized, particularly regarding follow-up on recommendations to the local government. Furthermore, the budgeting process faces challenges due to limited technical data, and public participation in legislative activities remains uneven. This activity provides recommendations for strengthening administration and institutional performance through digitalization, strengthening internal coordination, and improving human resource competencies to support more transparent and accountable local governance.

Keywords: Legislative Administration, Institutional Performance, Local Governance, Oversight Function, Internship Program

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memegang peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran (Ansar et al., 2025). Ketiga fungsi tersebut menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan

dan akuntabel, sehingga penguatan kinerja kelembagaan DPRD menjadi kebutuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Barru, DPRD berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan APBD, serta menyerap aspirasi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dinamika pemerintahan yang unik karena bersinggungan erat dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pelayanan aparat pemerintahan di wilayah Kabupaten Barru (Kurnia et al., 2024). Kondisi ini menjadi konteks penting yang membentuk karakter tata kelola kelembagaan, termasuk pada lingkungan sekretariat dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Barru.

Implementasi fungsi-fungsi DPRD di lapangan masih dibayangi berbagai hambatan, terutama pada aspek administrasi, koordinasi internal, dan kualitas sumber daya manusia. Persoalan seperti pengelolaan dokumen yang belum maksimal, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya keterlibatan masyarakat turut memengaruhi efektivitas kinerja lembaga (Asmarabia & Kristanto, 2023). Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang belum optimal juga menjadi persoalan umum di berbagai lembaga legislatif daerah, khususnya terkait administrasi keuangan dan dokumentasi kegiatan (Dasni et al., 2025).

Selain itu, permasalahan terkait transparansi informasi, tindak lanjut pengawasan yang belum optimal, akses data teknis yang terbatas dalam proses penganggaran, serta ketidakmerataan penyerapan aspirasi menjadi isu yang memerlukan perhatian. Penerapan prinsip-prinsip *good government governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah (Sunarmo dkk., 2023), sehingga menjadi rujukan penting dalam upaya perbaikan kelembagaan DPRD. Fungsi pengawasan yang efektif juga menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai peruntukan, terutama pada sektor-sektor pelayanan publik (Zainuddin et al., 2024).

Kegiatan magang mahasiswa di DPRD Kabupaten Barru dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian akademik sekaligus sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Kegiatan sejenis pada berbagai program pengabdian sebelumnya telah menunjukkan bahwa keterlibatan langsung mahasiswa di lembaga mitra memberikan dampak yang saling menguntungkan, baik bagi peningkatan kompetensi mahasiswa maupun bagi perbaikan tata kelola lembaga mitra (Fatimah et al., 2022). Melalui kegiatan magang di DPRD Kabupaten Barru, mahasiswa berpartisipasi langsung dalam aktivitas kesekretariatan, memperoleh pemahaman terhadap tata kelola administrasi dan kinerja kelembagaan, serta memberikan kontribusi berupa dokumentasi kondisi lapangan dan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan oleh lembaga mitra untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

DPRD Kabupaten Barru merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kabupaten Barru memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah bersama Bupati), fungsi anggaran (pembahasan dan persetujuan APBD), dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan APBD, serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, DPRD Kabupaten Barru didukung oleh alat kelengkapan dewan yang meliputi pimpinan, Badan Musyawarah, komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan administratif dan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang secara struktural berada di bawah Sekretaris Daerah namun secara operasional mendukung penuh pelaksanaan tugas DPRD.

METODE

Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Barru dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang memadukan partisipasi aktif dalam kegiatan kesekretariatan dan observasi terhadap tata kelola kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan mencakup beberapa tahap. Tahap pertama, orientasi dan pengenalan struktur organisasi DPRD serta lingkungan kerja sekretariat. Tahap kedua, partisipasi dalam kegiatan administrasi harian seperti pengelolaan dokumen, pengarsipan, penyiapan agenda persidangan, dan pelayanan tamu kelembagaan. Tahap ketiga, observasi langsung terhadap rapat-rapat komisi dan mekanisme kerja alat kelengkapan dewan. Tahap keempat, wawancara singkat dengan pegawai sekretariat dan staf pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai tata kelola administrasi, pola komunikasi antarunit, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Data pendukung kegiatan dihimpun melalui observasi partisipatif, dokumentasi terhadap prosedur operasional yang berlaku, serta studi pustaka terhadap referensi ilmiah yang relevan. Analisis

hasil kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi administrasi dan kinerja kelembagaan DPRD, termasuk penilaian terhadap sistem dokumentasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kompetensi sumber daya manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, kekuatan, dan peluang perbaikan yang dapat direkomendasikan sebagai kontribusi kegiatan magang bagi lembaga mitra.

Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan magang, permasalahan yang teridentifikasi pada DPRD Kabupaten Barru mencakup berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kesulitan utama terlihat pada aspek administrasi, khususnya penataan dokumen yang belum tertib serta pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas dalam mendukung aktivitas kelembagaan. Kondisi serupa juga banyak ditemukan pada sekretariat DPRD di daerah lain, di mana pembenahan tata kelola administrasi menjadi prioritas utama peningkatan kinerja (Asmarabia & Kristanto, 2023).

Koordinasi internal antarkomisi maupun antarbagian juga belum berlangsung secara efektif sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan agenda kerja. Peran kepemimpinan dalam sekretariat DPRD terbukti sangat menentukan efektivitas koordinasi dan peningkatan kinerja pegawai (Tinalia, 2024). Selain itu, penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam etika pelayanan aparat juga belum sepenuhnya terinternalisasi, padahal nilai-nilai tersebut memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada lembaga pemerintahan di Kabupaten Barru (Kurnia et al., 2024). Rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya keterbukaan informasi turut berdampak pada proses penyerapan aspirasi yang belum menyeluruh.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, akses terhadap data teknis yang belum memadai serta tindak lanjut rekomendasi yang belum maksimal turut menjadi persoalan yang teridentifikasi. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola agar kinerja DPRD Kabupaten Barru dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan magang di DPRD Kabupaten Barru dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu (1) partisipasi dalam kegiatan administrasi kelembagaan, (2) observasi terhadap kinerja fungsi legislatif, dan (3) rekomendasi perbaikan bagi lembaga mitra. Pada aspek administrasi, mahasiswa ditempatkan pada lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barru dan terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administrasi kelembagaan. Aktivitas yang dilakukan meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pengarsipan dokumen persidangan, penyusunan daftar hadir rapat, penyiapan bahan rapat, serta membantu proses dokumentasi administrasi kegiatan DPRD. Selain itu, mahasiswa turut membantu pengelompokan dan penataan dokumen yang berkaitan dengan agenda persidangan, laporan kegiatan, serta administrasi kesekretariatan lainnya sehingga memudahkan proses pencarian dan penyimpanan dokumen.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, mahasiswa juga mengikuti beberapa agenda kelembagaan seperti rapat komisi, rapat internal sekretariat, rapat Badan Musyawarah, dan rapat paripurna DPRD sesuai jadwal yang berlangsung selama masa magang. Keterlibatan dalam kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme kerja DPRD, alur koordinasi antarbagian, serta proses administrasi yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Melalui partisipasi langsung dalam kegiatan administrasi dan persidangan, diperoleh gambaran bahwa sistem administrasi DPRD Kabupaten Barru telah berjalan sesuai prosedur operasional yang berlaku. Namun demikian, sebagian besar proses dokumentasi dan pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pencarian data dan penyajian informasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kelembagaan.



Gambar 1. Kegiatan Persiapan Rapat DPRD Kabupaten Barru



Gambar 2. Pengelolaan Dokumen Administrasi DPRD Kabupaten Barru

Dokumentasi kegiatan menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam mendukung aktivitas administrasi dan kesekretariatan DPRD Kabupaten Barru. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis mengenai tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan dokumen kelembagaan, serta mekanisme pelaksanaan rapat dan persidangan yang menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja DPRD.

Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat direkomendasikan untuk memperkuat administrasi dan kinerja DPRD Kabupaten Barru. Pertama, perbaikan sistem administrasi dapat dilakukan melalui penerapan standar kerja yang lebih jelas, digitalisasi dokumen, dan pengelolaan arsip berbasis teknologi. Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi terbukti mampu meningkatkan efektivitas administrasi keuangan dan dokumentasi kegiatan lembaga (Dasni et al., 2025). Pendampingan berbasis digital juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja institusi mitra, sebagaimana ditunjukkan pada pendampingan pengelolaan keuangan berbasis digital di berbagai lembaga di Sulawesi Selatan (Arham et al., 2024).

Kedua, koordinasi internal dapat diperkuat dengan menetapkan jadwal rapat rutin, memperbaiki mekanisme komunikasi antarkomisi, dan memanfaatkan platform digital guna memastikan informasi tersampaikan secara konsisten. Penguatan peran kepemimpinan dalam sekretariat DPRD menjadi faktor kunci untuk memastikan koordinasi berjalan efektif serta mendorong peningkatan kinerja pegawai (Tinalia, 2024). Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal seperti *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* dalam budaya kerja juga dapat memperkuat etika pelayanan aparat kelembagaan (Kurnia et al., 2024).

Ketiga, dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan pelibatan masyarakat, DPRD dapat membangun portal informasi yang mudah dijangkau, memperluas ruang dialog publik, serta mengoptimalkan kegiatan reses secara lebih partisipatif. Pengalaman kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi digital pada lembaga mitra memerlukan pendampingan berjenjang dan berkelanjutan agar dapat diadopsi secara berkesinambungan (Fatimah et al., 2022). Prinsip *good government governance* mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kebijakan publik sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik (Sunarmo dkk., 2023).

Keempat, untuk mendukung fungsi pengawasan dan penganggaran, peningkatan akses terhadap data teknis dapat dilakukan melalui kolaborasi yang lebih aktif dengan perangkat daerah, serta penggunaan sistem informasi anggaran yang terintegrasi. Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang akuntabel (Zainuddin et al., 2024).

Kelima, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkala terkait tata kelola pemerintahan, analisis kebijakan, dan teknologi informasi akan membantu memperkuat profesionalisme serta kinerja lembaga secara menyeluruh. Penilaian kinerja kelembagaan legislatif yang berkelanjutan menjadi instrumen penting dalam mengukur pencapaian dan mendorong perbaikan berkelanjutan (Ansar et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Barru dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran masih dipengaruhi oleh sejumlah hambatan, seperti administrasi yang belum tertata dengan baik, koordinasi internal yang kurang efektif, pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik. Kegiatan ini memberikan kontribusi berupa dokumentasi kondisi lapangan sekaligus rekomendasi perbaikan yang relevan bagi lembaga mitra.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, disarankan agar DPRD Kabupaten Barru memperbaiki sistem administrasi melalui digitalisasi dan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, sekaligus memperkuat koordinasi internal melalui alur komunikasi yang lebih terstruktur. Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar proses penyerapan aspirasi berjalan lebih menyeluruh. Selain itu, fungsi pengawasan dapat diperkuat dengan menyediakan akses data teknis yang lebih lengkap, sementara peningkatan kompetensi anggota dan staf melalui pelatihan rutin mengenai tata kelola pemerintahan, analisis kebijakan, dan teknologi informasi akan mendukung peningkatan profesionalisme serta akuntabilitas lembaga. Kegiatan magang serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari pengabdian akademik perguruan tinggi untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga pemerintahan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan dan seluruh jajaran DPRD Kabupaten Barru yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan magang. Terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, A., Farida, U., Rahmatia, M., & Kurniawaty, K. (2025). Governance performance assessment of the provincial legislative council: A study in South Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Economic Resource*, 8(2). <https://doi.org/10.57178/jer.v8i2.1952>
- Arham, A., Harun, H., & Rafiqah, R. (2024). Pengaruh pendampingan pengelolaan keuangan berbasis digital dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kota Parepare binaan Rumah BUMN PT Telkom Witel Sulsel-Barat. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.31850/decision.v5i2.3320>
- Asmarabia, & Kristanto, B. (2023). Analisis kinerja Sekretariat DPRD pasca berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 di Kota Banjarbaru. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 170–179. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3022>
- Dasni, D., Abidin, Z., & Ramadhan, S. (2025). Effectiveness of the implementation of local government information systems in financial administration. *Perspektif*, 14(1), 19–29. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i1.12791>

- Fatimah, F., Arfianty, A., Nurwani, N., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2022). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui kegiatan pengenalan Go-Digital bagi UMKM di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 2(2), 89–93. <https://doi.org/10.55678/mallomo.v2i2.732>
- Kurnia, T., Nuryadin, R., & Harun, H. (2024). Implementasi nilai-nilai kearifan lokal terhadap kinerja pelayanan aparat pada Kantor Desa Manuba Kabupaten Barru. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 98–111. <https://doi.org/10.31850/decision.v5i1.2941>
- Sunarmo, A., dkk. (2023). Penerapan prinsip-prinsip *good government governance*, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi SDM terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1).
- Tinalia. (2024). Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2).
- Zainuddin, E., Oktarina, E., & Irawan, S. (2024). Optimalisasi peran pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dalam bidang kesehatan. *Nova Juris: Jurnal Hukum*, 2(2), 50–59.